

**ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM PROSES PEMBANGUNAN
DI DESA LANDUNGSARI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Administrasi Publik



Oleh :

Priska Nirmala

NIM.2017210127

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM PROSES

PEMBANGUNAN DI DESA LANDUNGSARI

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email : priskanirmala4@gmail.com

ABSTRAK

Etika pemerintah ialah aturan moral dalam mengarahkan pemerintahan yang terorganisir, moral otoritas publik menjadi acuan dalam berperilaku sehingga upaya untuk membuat pemerintahan yang bersih akan lebih mudah untuk dicapai. dan sesuai dengan wujud kerja yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai aturan umum, sisi moral pemerintah yang harus dicoba antara lain, perangkat wajib melayani kepentingan publik, alat ialah daya dorong utama. Moral pemerintah tidak dapat dipisahkan dari moral administrasi. Organisasi yang ialah instrumen penting di arena publik sebagai individu yang bertanggung jawab untuk memilah-milah bantuan pemerintah daerah yang bisa dijalankan dengan mengadakan atau memprogram pembangunan-pembangunan seperti, pasar, rumah, dan sumber air bersih (PDAM). Perwujudan dan keberhasilan etika pemerintah dapat diukur dengan kinerja-kinerja yang dijalankan.

Riset berikut memakai kualitatif. Untuk memperoleh data primer dan sekunder, mengumpulkan data memakai mewawancarai, observasi, dan mendokumentasikan. Untuk menentukan informan melakukan ialah purposive sampling. Lalu menganalisa statement Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015). Sebagai pengujian keabsahannya data memakai triangulasi teknik.

Dari hasil riset menunjukkan bahwasannya Etika Penyelenggara Pemerintah Untuk Proses Pembangunan Di Desa Landungsari Meliputi Etika Individu, Etika Organisasi, Etika Profesi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai proses atau prosedur yang ada dan pelaksanaan job desk nya dan fungsinya sama dengan bidangnya per divisi, partisipasi masyarakat sangat efektif dalam kegiatan gotong royong desa dan responsif pemerintah dalam menanggapi usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, transparansi melalui sosialisasi bersama rt/rw dan masyarakat desa dan Dengan adanya faktor pendukung seperti sumber daya manusia yang baik dan kekompakan dalam bekerja tetapi harus memperbaiki seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran dan masih ada beberapa pegawai yang berhalangan masuk kerja atau kurang kedisiplinan waktu.

Kata Kunci : Moral, Etika, Birokrasi Dan Pelayanan Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Moral otoritas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sempurna memiliki kedudukan yang vital. Sebagai kaidah etika dalam mengkoordinasikan suatu pemerintahan yang terencana, moral otoritas publik menjadi acuan dalam berperilaku sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang sempurna dirasa lebih mudah untuk dilaksanakan.. Dengan kata lain, etika dianggap sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk tercapainya keberhasilan pembangunan sehingga akan berdampak pada dinamika terhadap lingkungan masyarakat.

Moral dalam pemerintahan harus dibangun dalam pandangan pemahaman mendasar yang mencerminkan kerangka kerja yang hidup di arena publik yang harus diarahkan dan diakui oleh alat dalam keberadaan masyarakat, negara dan negara. Sebagai aturan umum, moral upsides pemerintahan yang harus dimasukkan antara lain, perangkat wajib melayani kepentingan publik, alat ialah pendorong utama di belakang otoritas publik.

Berbicara tentang etika pemerintah tidak terlepas dari etika birokrasi. Birokrasi yang ialah instrument yang urgent pada publik sebagai Penanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang bisa dijalankan dengan mengadakan atau memprogram pembangunan-pembangunan seperti, pasar, rumah, dan sumber air bersih (PDAM). Perwujudan dan keberhasilan etika pemerintah dapat diukur dengan kinerja-kinerja yang dijalankan. Dibandingkan dengan moral pemerintahan, hal-hal yang berkaitan dengan proses organisasi otoritas publik terkait dengan pentingnya menyelesaikan kewajiban dan kewajiban sebagai pekerjaan yang tidak sepenuhnya diselesaikan dan sesuai dengan pedoman hukum.

Etika dalam kebijakan publik memuat beberapa hal yang patut ditinjau terlebih dahulu, seperti kebijakan publik harus berpusat kepada masyarakat sebagai objek publik, sehingga harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi, kebijakan publik juga harus berorientasi pada sebab akibat yang ditimbulkan, impact dari kebijakan publik harus lebih besar dari *effect* yang ditimbulkan. Beberapa masalah yang sering terjadi akibat kebijakan publik yang kurang ideal diantaranya ialah, pembangunan daerah menjadi terhambat, selain itu kurangnya koordinasi antara pelaksana kebijakan serta berbagai masalah masalah lain seperti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi masalah masalah yang umum terjadi dalam kebijakan publik terutama dalam kebijakan pembangunan desa.

Kebijakan pembangunan desa dapat dikatakan serangkaian tahapan latihan yang mencakup berbagai komponen di dalamnya, untuk menggunakan dan menetapkan aset yang ada untuk bekerja pada bantuan pemerintah yang bersahabat dalam iklim teritorial dalam waktu tertentu.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan desa harus memperhatikan betul etika dan kaidah dalam pembuatan kebijakan, Untuk menghindari hal-hal biasa yang sering terjadi, misalnya, sering terjadi antara organisasi yang menyusun strategi dan strategi khusus yang menjalankan kantor ada celah karena ketergantungan pada pertemuan yang berbeda.

Keterjangkauan informasi data yang diberikan oleh instansi di luar pemerintah daerah selama ini seringkali tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Pada saat proses penyusunan program/gerakan membutuhkan informasi, informasi seringkali tidak segera dapat diakses. Sejauh puncak informasi, juga sering ada masalah, kebutuhan informasi untuk siklus ujian sangat bergantung pada pertemuan yang berbeda. Pengelolaan pembangunan desa diperlukan untuk meningkatkan elektabilitas desa, tapi maraknya penyalahgunaan dana desa dan hibah untuk pembangunan desa yang dipergunakan secara pribadi oleh aparatur desa, menjadikan

banyak desa yang tertinggal, kebijakan-kebijakan pemerintah sudah dikeluarkan untuk mengatasi hal tersebut, tetapi masih saja terdapat penyelewengan dalam upaya pembangunan desa (Mustangin, 2020)

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang, ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI DESA LANDUNGSARI. peneliti bermaksud untuk melihat bagaimana model kebijakan dan proses kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa Landungsari dalam proses pembangunan desa, apakah masih mengalami masalah-masalah yang sama seperti yang dijabarkan diatas, atau memiliki mekanisme yang lebih kompleks.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah paling yang mendasar untuk sebuah pertanyaan untuk melaksanakan riset, demikian lah perumusan permasalahannya ialah:

1. Bagaimana etika penyelenggara Pemerintah dalam proses pembangunan Desa Landungsari?
2. Apa saja faktor penunjang dan yang menghambat etika pemerintah pada proses pembangunan Desa Landungsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah keinginan yang menjadikan sebuah target pencapaian sehingga dilakukannya sebuah riset. Sebab itulah tujuan dari riset berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana etika penyelenggara pemerintah dalam proses pembangunan Desa Landungsari
2. Untuk menganalisis apa saja faktor penunjang dan penghambat etika penyelenggara pemerintah dalam proses Pembangunan Desa Landungsari

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah fungsi dari sebuah riset, sehingga kegunaan dari penelitian ini yakni :

1. Memberikan Sumbangan pemikiran dan perbaikan terhadap proses pembelajaran etika penyelenggara pemerintah dalam proses pembangunan Desa Landungsari
2. Hasil ini digunakan untuk bahan evaluasi dalam mempelajari etika penyelenggara pemerintah dalam proses pembangunan Desa Landungsari

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal: 57
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ahmad, Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras Sukses Offset.
- Mustangin, 2020. *Pemberdayaan-Masyarakat Desa Masih Memiliki Harapan Panjang*. Cilacap
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwin. 1998. *Community Responsibility*. Texas: Social Science Publisher
- Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19
- Kusumawati. 2016. *Harmonisasi Etika Publik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Pengajar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
- Dossy IP dan Bernanrd. 2011. *Etika Publik*. Mataram, 19 Juli 2018, Haeli., SE., M.Ak
- YP. Wisok, 2009. *Ethics is the study of right and wrong*. UNODC dan Universidade Aberta ialah mitra dalam mendukung pengajaran etika dan integritas di universitas. London.
- Sumaryadi 2010. *Etika Kebijakan Publik*. Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia.
- Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267
- Makmur, H. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. PT Refika Aditama.

- Mendes. 2018. *Kebijakan Percepatan Pembangunan Desa*. Tangerang: Putu Ayu Publisher
- Miles, B Matthew.dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis.London*. SAGE Publications
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta. Ui Press
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Texas: Infash Media
- Mustangin, Muhamad Azam. *Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen: Vol.8, No.2
- Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Safira, Ananda Putri.2017. *Etika Pemerintah.Yogyakarta*: Gramedia Nusantara
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik* . Malang: Intelegensia Media
- Sriatmi, Ayu. 2017. *Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Info Media
- Sugiyono.2018.*Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Tay, Dicky Siswanto & Rusmiwari, Sugeng. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.8, No